**Publication1**

**RENCANA KERJA TAHUN 2025**

**(RENJA TAHUN 2025)**

**KECAMATAN BONTOHARU**

2024

6/25/2024



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar  yaitu “KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”  yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan  susunan organisasi dan tugas/fungsi pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 a

Ayat (1), Pasal 225 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan :

pasal 224 ayat (1) *: “Kecamatan dipimpin oleh  seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.”*

pasal 225 ayat (1) : “*Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1)*

*mempunyai tugas :*

1. *menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);*
2. *mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*
3. *mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
4. *mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;*
5. *mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;*
6. *mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;*
7. *membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.*
8. *melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan*
9. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 226 ayat (1) : “*selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka perlu dibuat suatu  pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang  baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.  Adapun pelaksanaan pembangunan  dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar  Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan  di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Bontoharu.

* 1. **LANDASAN  HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontoharu, adalah :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar  Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

* 1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, adalah :

* Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bontoharu Tahun 2025.
* Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bontoharu pada Tahun 2025.

1. Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, adalah :

* Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bontoharu Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.
* Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
* Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bontoharu dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Bontoharu Tahun 2025, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Renja Kecamatan Bontoharu, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

.BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BONTOHARU TAHUN 2023

- Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontoharu tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Bontoharu yang berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya.

- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

- Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu berisikan uraian mengenai : sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistainable Developmnet Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarkat

Dalam bagian ini di uraikan hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BONTOHARU

* Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan perioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
* Tujuan dan sasaran renja SKPD perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah
* Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. **BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA**

**KECAMATAN BONTOHARU TAHUN 2023**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bontoharu**

Kecamatan Bontoharu telah mengevaluasi kinerja tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Kecamatan Bontoharu telah mengevaluasi program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
     + Perencanaan, Penganggaran&Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     + Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     + Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     + Administrasi Umum Perangkat Daerah
     + Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     + Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
     + Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
     + Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
     + Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
     + Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
     + Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman&Ketertiban Umum
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
     + Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
     + Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**

**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

|  |
| --- |
| * 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu**   Kecamatan Bontoharu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Dinas, Badan, Lembaga ) lain dilingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Bontoharu masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan,  antara lain:  (1) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;  (2) Sistem kerja yang belum optimal;  (3) keterbatasan SDM yang berkualitas  Jenis Indikator yang dikaji,disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat  Daerah,serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayan  an  Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |  | |  | **Tabel 2.2** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | **Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu** | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | **Kabupaten Kepulauan Selayar** | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | | **Indikator** | | **SPM/Standar Nasional** | **Indikator Kinerja Kunci / IKK** | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | **Catatan Analisis** |
| **Target Renja Tahun 2023** | **Target Renja Tahun 2024** | **Target Renja Tahun 2025** | **Target Renja Tahun 2026** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** |
|
| **1** | | **2** | | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | | Peningkatan Pelayanan di Tk Kecamatan dan Desa/Kelurahan | |  |  | 20 Menit | 15 Menit | 10 Menit | 8 Menit | 20 Menit |  | 15 Menit | 10 Menit | Target tercapai |
| 2 | | % Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Target tercapai |
| 3 | | % Penurunan jumlah kriminalitas di Kecamatan | |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | Target tercapai |
| 4 | | % Urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan | |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | Target tercapai |
| 5 | | % Urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 45 |  | 50 | 55 | Target tercapai |

* 1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontoharu**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepulauan Selayar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kepulauan selayar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
   1. **Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kecamatan Bontoharu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Bontoharu masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

(1) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;

(2) Sistem kerja yang belum optimal;

(3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Proses Reviuw terhadap rancangan awal RKPD yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Adapun Reviuw terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABEL. 2.3** |  |  |
| **REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024** |  |  |
| **KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** |  |  |
| **NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BONTOHARU** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **RANCANGAN AWAL RKPD** | | |  |  |  |  | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | |  |  |  |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | | | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | | | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Catatan Penting** |
|
|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **Kec Bontoharu** | **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100** | **4.439.027.718** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **Kec Bontoharu** | **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100** | **4.767.379.281** |  |
| X.XX.01.2.01 | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | **13.000.000** | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | **16.426.800** |  |
| X.XX.01.2.01.01 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (Renja,RKA,DPA.RKAP,DPPA, Renstra) |  | 0 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis |  | 2.100.000 |  |
| X.XX.01.2.01.01 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kel. Bontobangun | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (RKA dan DPA) | 2 dok | 5.000.000 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kel. Bontobangun | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (RKA dan DPA) | 2 dok | 7.826.800 |  |
| X.XX.01.2.01.02 |  | b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen RKA yang dikoordinasikan | 1 dok | 2.000.000 |  | b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen RKA yang dikoordinasikan | 1 dok | 2.400.000 |  |
| X.XX.01.2.01.03 |  | c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen RKA perubahan yang dikoordinasikan |  |  |  | c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen RKA perubahan yang dikoordinasikan |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.01.04 |  | d | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan | 1 dok | 2.000.000 |  | d | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan | 1 dok | 2.700.000 |  |
| X.XX.01.2.01.05 |  | e | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan | 1 dok | 2.000.000 |  | e | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan |  | - |  |
| X.XX.01.2.01.07 |  | f | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai Juknis (LAKIP, LPPD, LKPJ) | 3 dok | 2.000.000 |  | f | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai Juknis (LAKIP, LPPD, LKPJ) | 3 dok | 1.400.000 |  |
| X.XX.01.2.01.0 |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec Bontoharu | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan |  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec Bontoharu | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.02. | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | persentase administrasi keuangan yang tersedia | 100 | **2.749.584.970** | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | persentase administrasi keuangan yang tersedia |  | **2.866.057.700** |  |
| X.XX.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec Bontoharu | Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan | 30 orang | 2.551.522.372 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec Bontoharu | Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan | 30 orang | 2.806.821.900 |  |
| X.XX.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kel.Putabangun | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia | 100% | 55.562.926 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kel.Putabangun | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia | 100% | 46.245.600 |  |
| X.XX.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kel.Bontobangun | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia | 100% | 136.499.672 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kel.Bontobangun | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran yang tersedia | 100% | - |  |
| X.XX.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah verifikasi keuangan |  |  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah verifikasi keuangan |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rekon akutansi yang dikoordinasikan |  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rekon akutansi yang dikoordinasikan |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 dok | 3.000.000 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 lap | 2.370.000 |  |
| X.XX.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kel.Bontobangun | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 dok | - |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kel.Bontobangun | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 lap | 10.620.200 |  |
| X.XX.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan yang di kelolah |  |  |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan yang di kelolah |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasikan | 2 Laporan | 3.000.000 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasikan |  | - |  |
| X.XX.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kec Bontoharu | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan yang disusun |  |  |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kec Bontoharu | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan yang disusun |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.03 | C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai |  | **3.000.000** | C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang memadai |  | **-** |  |
| X.XX.01.2.03.01 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan BMD  yang disusun |  |  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan BMD  yang disusun |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.02 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengamanan BMD |  |  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengamanan BMD |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.03 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan |  |  |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.04 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Aset BMD | 1 dok | 3.000.000 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Laporan Aset BMD |  | - |  |
| X.XX.01.2.03.06 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |
| X.XX.01.2.03.07 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |
| X.XX.01.2.05. | D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional perkantoran |  | **53.150.798** | D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional perkantoran |  | **4.455.600** |  |
| X.XX.01.2.05.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec Bontoharu | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | 16 pasang | 8.000.000 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec Bontoharu | Jumlah pakaian dinas yang disediakan |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.05.03 |  |  | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kec Bontoharu | Jumlah pegawai yang didata dan di kelolah Administrasi kepegawaiannya | 30 orang | 2.000.000 |  |  | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dok | 4.455.600 |  |
| X.XX.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kec Bontoharu | Jumlah Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang di koordinasikan | 2 sistem | 2.000.000 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kec Bontoharu | Jumlah Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang di koordinasikan |  | - |  |
| X.XX.01.2.05.05 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kec Bontoharu | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kec Bontoharu | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.06 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Kec Bontoharu | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Kec Bontoharu | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.07 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Kec Bontoharu | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Kec Bontoharu | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.08 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Kec Bontoharu | Jumlah pemindah-tugasan ASN |  |  |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Kec Bontoharu | Jumlah pemindah-tugasan ASN |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Makassar | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tugas dan Fungsi | 3 orang | 15.000.000 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Makassar | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tugas dan Fungsi | 0 | 0 |  |
| X.XX.01.2.05.10 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah sosialisasi  Peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah sosialisasi  Peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Makassar | Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti | 2 orang | 10.000.000 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Makassar | Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti | 0 | 0 |  |
| X.XX.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Makassar | Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti | 3 orang | 16.150.798 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Makassar | Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diikuti | 1 Orang | - |  |
| X.XX.01.2.06. | E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Pesentase ketersediaan administrasi umum perkantoran |  | **272.233.030** | E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kec Bontoharu | Pesentase ketersediaan administrasi umum perkantoran |  | **358.156.700** |  |
| X.XX.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor AULA(Pemasangan Instalasi Listrik dan perlengkapannya) | 1 Unit | 960.140 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor AULA(Pemasangan Instalasi Listrik dan perlengkapannya) | 0 | - |  |
| X.XX.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kipas angin,AC,Laptop,dan Printer) | 8 Unit | 80.350.950 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8 unit | 27.200.000 |  |
| X.XX.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laptop,dan Printer) | 4 unit | 14.000.000 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 14 unit | 102.150.200 |  |
| X.XX.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec Bontoharu | Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec Bontoharu | Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec Bontoharu | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 3340 lbr | 3.000.000 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec Bontoharu | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 3.220.000 |  |
| X.XX.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kel.Putabangun | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 24.004 lbr | 11.150.990 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kel.Putabangun | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 9.576.500 |  |
| X.XX.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec Bontoharu | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Langganan Koran dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undanagan) | 2 bahan bacaan | 5.000.000 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec Bontoharu | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan |  | - |  |
| X.XX.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kel.Putabangun | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Langganan Koran dan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan) |  | 0 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kel.Putabangun | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 2 Dokumen | 1.800.000 |  |
| X.XX.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Kec Bontoharu | Jumlah bahan yang disediakan |  |  |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Kec Bontoharu | Jumlah bahan yang disediakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec Bontoharu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 200 orang | 4.800.000 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec Bontoharu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 0 | 4.800.000 |  |
| X.XX.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 322 kali | 80.000.000 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 322 kali | 72.780.000 |  |
| X.XX.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kel.Putabangun | Jumllah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 305 kali | 72.970.950 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kel.Putabangun | Jumllah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 310 kali | 69.750.000 |  |
| X.XX.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kel.Bontobangun | Jumllah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 0 | 0 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kel.Bontobangun | Jumllah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 305 kali | 66.880.000 |  |
| X.XX.01.2.06.10 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan |  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.06.11 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah fasilitas pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik |  |  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kec Bontoharu | Jumlah fasilitas pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik |  |  |  |
| X.XX.01.2.07. | F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Kec Bontoharu | persentase Ketersediaan BMD |  | **95.000.000** | F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Kec Bontoharu | persentase Ketersediaan BMD |  | **-** |  |
| X.XX.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan | 0 | 35.000.000 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan | 0 | 0 |  |
| X.XX.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec Bontoharu | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec Bontoharu | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Kec Bontoharu | Jumlah mebel yang dipersiapkan |  |  |  |  | Pengadaan Mebel | Kec Bontoharu | Jumlah mebel yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (AC,Laptop,Printer,LCD,Sound Sistem) | 100% | 60.000.000 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (AC,Laptop,Printer,LCD,Sound Sistem) |  | - |  |
| X.XX.01.2.07.07 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.07.09 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Meja dan Kurs Camat/Sekcam) | 0 | 0 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 0 | 0 |  |
| X.XX.01.2.07.11 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan (Kursi Tamu) | 1 Set | - |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan |  | 0 |  |
| X.XX.01.2.08. | G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran |  | **1.113.558.220** | G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec Bontoharu | Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran |  | **1.159.114.081** |  |
| X.XX.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec Bontoharu | Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec Bontoharu | Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan |  |  |  |
| X.XX.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec Bontoharu | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 3 jasa | 12.789.000 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec Bontoharu | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 12 Lap | 15.985.000 |  |
| X.XX.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kel.Putabangun | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 3 jasa | 18.799.000 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kel.Putabangun | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 12 Lap | 15.618.611 |  |
| X.XX.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 3 jasa | 13.000.000 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | 12 Lap | 28.640.470 |  |
| X.XX.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan |  |  |  |
| X.XX.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 4 jasa | 270.000.000 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec Bontoharu | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 12 Lap | 93.330.000 |  |
| X.XX.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 4 jasa | 798.970.220 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kel.Putabangun | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 12 Lap | 400.200.000 |  |
| X.XX.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kel.Bontobangun | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 0 | 0 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kel.Bontobangun | Jumlah jasa pelayanan umum kantor uang disediakan (ATK, Honorarium PHL,BPJS PHL, Makan Minum Rapat) | 12 lap | 605.340.000 |  |
| X.XX.01.2.09. | H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec Bontoharu | %  pemeliharan BMD |  | **139.500.700** | H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec Bontoharu | %  pemeliharan BMD |  | **363.168.400** |  |
| X.XX.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Kec Bontoharu | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |  | Pemeliharaan Mebel | Kec Bontoharu | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |
| X.XX.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya | 3 unit | 3.000.000 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya | 3 unit | 5.680.000 |  |
| X.XX.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kel.Putabangun | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya |  | - |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kel.Putabangun | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya | Unit | 2.920.000 |  |
| X.XX.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kel.Bontobangun | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya |  | - |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kel.Bontobangun | Jumlah peralatan dan mesin yang ditingkatkan usia pakainya | Unit | 9.210.000 |  |
| X.XX.01.2.09.07 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah aset yang ditingkatkan usia pakainya | 6 unit | 3.600.000 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah aset yang ditingkatkan usia pakainya | 6 unit | 3.050.000 |  |
| X.XX.01.2.09.08 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kec Bontoharu | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kec Bontoharu | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |
| X.XX.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | 8.000.000 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | 4.919.400 |  |
| X.XX.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kel.Putabangun | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | 29.950.350 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kel.Putabangun | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | 123.120.000 |  |
| X.XX.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kel.Bontobangun | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | - |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kel.Bontobangun | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi | 1 unit | 119.029.000 |  |
| X.XX.01.2.09.010 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |
| X.XX.01.2.09.11 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec Bontoharu | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |
| X.XX.01.2.09.12 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Kec Bontoharu | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Kec Bontoharu | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |
| X.XX.01.2.09.13 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kec Bontoharu | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 7 unit | 65.000.000 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kec Bontoharu | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 7 unit | 51.830.000 |  |
| X.XX.01.2.09.13 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kel.Putabangun | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 8 unit | 29.950.350 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kel.Putabangun | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 8 unit | 18.560.000 |  |
| X.XX.01.2.09.13 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kel.Bontobangun | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 0 | 0 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kel.Bontobangun | Jumlah kendaraan dinas yang ditingkatkan umur pakainya | 8 unit | 24.850.000 |  |
| X.XX.01.2.10. | I | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  |  |  |  | I | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  |  |  |  |  |
| X.XX.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  |  |  |  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  |  |  |  |  |
| **07.00** | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  |  |
| **07.01** | KECAMATAN | | |  |  |  |  | KECAMATAN | | |  |  |  |  |  |
| **07.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **Kec Bontoharu** | **Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan** | **20 menit** | **50.252.127** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **Kec Bontoharu** | **Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan** | **20 menit** | **38.814.500** |  |
| 7.01.02.2.01 | A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan | **100** | **42.272.204** | A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan |  | **32.834.500** |  |
| 7.01.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kel.Putabangun | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk) | 1 keg | 20.992.409 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kel.Putabangun | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk) | 1 lap | 32.834.500 |  |
| 7.01.02.2.01.02 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kel. Bontobangun | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk) | 1 keg | 21.279.795 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kel. Bontobangun | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk) | 1 lap | - |  |
| 7.01.02.2.01.02 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ditingkatkan |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ditingkatkan |  |  |  |
| 7.01.02.2.02. | B | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran | 100 | **3.979.923** | B | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran |  | **3.000.000** |  |
| 7.01.02.2.02.01 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan |  |  |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan |  |  |  |
| 7.01.02.2.02.02 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi | 6 desa | 0 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi | 1 lap | 0 |  |
| 7.01.02.2.02.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Efektifitas Pelayanan kepada masyrakat di tingkat Kecamatan yang disusun ( Laporan Informasi Kependudukan) | 1 keg | 3.979.923 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Efektifitas Pelayanan kepada masyrakat di tingkat Kecamatan yang disusun ( Laporan Informasi Kependudukan) | 1 lap | 3.000.000 |  |
| 7.01.02.2.03. | C | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Kec Bontoharu | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara |  | 0 | C | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Kec Bontoharu | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara |  | 0 |  |
| 7.01.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec Bontoharu | Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec Bontoharu | Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |
| 7.01.02.2.03.02 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Kec Bontoharu | Jumlah Prasaranan dan  Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara |  |  |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Kec Bontoharu | Jumlah Prasaranan dan  Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara |  |  |  |
| 7.01.02.2.04. | D | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Kec Bontoharu | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan | 100 | **4.000.000** | D | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Kec Bontoharu | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan |  | **2.980.000** |  |
| 7.01.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec Bontoharu | Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec Bontoharu | Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.02 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec Bontoharu | Jumlah Non Perizinan |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec Bontoharu | Jumlah Non Perizinan |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec Bontoharu | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan (Penyusunan Propil Kecamatan) | 1 dok | 4.000.000 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec Bontoharu | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan | 1 lap | 2.980.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | Kec Bontoharu | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)** | **100** | **1.916.142.934** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | Kec Bontoharu | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)** | **100** | **1.875.374.589** |  |
| 7.01.03.2.01. | A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Kec Bontoharu | % Kegiatan Pemberdayaan Desa | **100** | 1.875.702.934 | A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Kec Bontoharu | % Kegiatan Pemberdayaan Desa | **100** | 1.875.374.589 |  |
| 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel | 50 0rang | 17.448.637 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kel.Putabangun | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel | 5 lembaga | 12.138.200 |  |
| 7.01.03.2.01.02 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel | 50 Orang | 19.000.000 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kel. Bontobangun | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel | 5 lembaga | 11.349.900 |  |
| 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disinkronkan (Pembinaan Kampung KB dan Penaganan Gizi buruk) | 2 Keg | 9.695.729 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disinkronkan (Pembinaan Kampung KB dan Penaganan Gizi buruk) | 2 dok | 18.000.000 |  |
| 7.01.03.2.01.03 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Putabangun | 11 Unit | 429.321.158 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Putabangun | 10 Unit | 823.869.109 |  |
| 7.01.03.2.01.03 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bontobangun | 10 unit | 1.006.245.662 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bontobangun | 10 unit | 604.269.230 |  |
| 7.01.03.2.01.04 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah Keg Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | 2 Keg | 127.140.643 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah Keg Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | 2 pokmas | 71.751.250 |  |
| 7.01.03.2.01.04 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah Keg Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | 2 Keg | 190.000.000 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah Keg Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | 2 pokmas | 240.997.100 |  |
| 7.01.03.2.01.05 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan | 2 Keg | 18.950.637 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Kel.Putabangun | Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan | 1 lap | - |  |
| 7.01.03.2.01.05 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan | 1 Keg | 9.000.000 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Kel. Bontobangun | Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan | 1 lap | - |  |
| 7.01.03.2.01.06 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat) | 1 Keg | 13.500.000 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat) | 1 lap | 17.000.000 |  |
| 7.01.03.2.01.06 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | 1 Keg | 35.400.468 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | 1 lap | 5.999.800 |  |
| 7.01.03.2.01.06 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kel.Bontobangun | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | 1 Keg | - |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kel.Bontobangun | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | 1 lap | 70.000.000 |  |
| 7.01.03.2.02. | B | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan |  | 40.440.000 | B | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Kec Bontoharu | % Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan |  | - |  |
| 7.01.03.2.02.01 |  |  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kel. Bontobangun | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan) | 1 Lembaga | 20.440.000 |  |  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Kel. Bontobangun | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan) | 1 Lembaga | - |  |
| 7.01.03.2.02.02 |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatn | Kel. Bontobangun | Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Kegiatan Kelurahan Sehat) | 3 Unit | 15.000.000 |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatn | Kel. Bontobangun | Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Kegiatan Kelurahan Sehat) | 3 Unit | - |  |
| 7.01.03.2.02.03 |  |  | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Kec Bontoharu | Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi | 2 klp | 5.000.000 |  |  | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Kec Bontoharu | Jumlah laporan usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi | 1 lap | - |  |
| **07.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **Kec Bontoharu** | **Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%)** | **1,00** | **472.092.264** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **Kec Bontoharu** | **Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%)** | **1,00** | **35.345.200** |  |
| 7.01.04.2.01. | A | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Kec Bontoharu | % Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | **1,00** | 461.812.468 | A | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Kec Bontoharu | % Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | **1,00** | 26.495.200 |  |
| 7.01.04.2.01. |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 dok | 21.279.796 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 lap | 2.750.000 |  |
| 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 Keg | 11.000.000 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 lap | 14.400.000 |  |
| 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kel. Bontobangun | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 Keg | - |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kel. Bontobangun | Jumlah laporan Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 lap | 9.345.200 |  |
| 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kel. Bontobangun | Persentase hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di harmonisasikan | 100% | 429.532.672 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kel. Bontobangun | Persentase hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di harmonisasikan | 100% | - |  |
| 7.01.04.2.02. | B | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | | Kec Bontoharu | % penerpan dan penegakan perda dan perkada | 100 | 10.279.796 | B | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | | Kec Bontoharu | % penerpan dan penegakan perda dan perkada |  | 8.850.000 |  |
| 7.01.04.2.02.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia | Kel.Putabangun | Jumlah Kegiatan penegakan Peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan (Penertiban ternak liar terlaksana sesuai perda dan berkurangnya persentase kasus illegal logging) | 2 Keg | 10.279.796 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia | Kel.Putabangun | Jumlah laporan penegakan Peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan (Penertiban ternak liar terlaksana sesuai perda dan berkurangnya persentase kasus illegal logging) | 2 lap | 8.850.000 |  |
| **07.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | Kec Bontoharu | **Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan (%)** | **0,00** | **74.479.285** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | Kec Bontoharu | **Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan (%)** | **0,00** | **57.805.000** |  |
| 7.01.05.2.01. | A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | 2 Keg | 74.479.285 | A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | 2 Keg | 57.805.000 |  |
| 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec Bontoharu | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 250 0rang | 26.199.489 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec Bontoharu | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 250 0rang | 23.000.000 |  |
| 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kel.Putabangun | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 50 orang | 5.445.123 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kel.Putabangun | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 50 orang | 12.321.600 |  |
| 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kel.Bontobangun | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 50 orang | - |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kel.Bontobangun | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 50 orang | - |  |
| 7.01.05.2.01.02 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kec Bontoharu | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan |  |  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kec Bontoharu | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.03 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec Bontoharu | Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  |  |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec Bontoharu | Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 1 keg | 27.000.000 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec Bontoharu | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 200 orang | 14.000.000 |  |
| 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kel.Putabangun | Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 1 keg | 5.194.775 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kel.Putabangun | Jumlahorang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 50 orang | 8.483.400 |  |
| 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kel. Bontobangun | Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 2 keg | 10.639.898 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kel. Bontobangun | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ras dan golongan lainnya yang dilaksanakan | 50 orang | 0 |  |
| 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah konflik yang ditangani |  |  |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah konflik yang ditangani |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.06 |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.07 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Kec Bontoharu | Jumlah urusan pemerintahan |  |  |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Kec Bontoharu | Jumlah urusan pemerintahan |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan |  |  |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah Forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | Kec Bontoharu | **Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)** | **55** | **154.916.911** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | Kec Bontoharu | **Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)** | **55** | **154.360.420** |  |
| 7.01.06.2.01 | A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Kec Bontoharu | % pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan |  | 154.916.911 | A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Kec Bontoharu | % pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan |  | 154.360.420 |  |
| 7.01.06.2.01.01 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  |  |  |
| 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan tata pemerintahan desa/kel yang difasilitasi (Lomba desa/kel) | 1 Keg | 16.415.294 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan tata pemerintahan desa/kel yang difasilitasi (Lomba desa/kel) |  | - |  |
| 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi | 1 Keg | 2.000.000 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi |  | - |  |
| 7.01.06.2.01.04 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasiitasi | 1 Keg | 3.000.000 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec Bontoharu | Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasiitasi | 1 lap | 3.500.000 |  |
| 7.01.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kec Bontoharu | Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kec Bontoharu | Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi |  |  |  |
| 7.01.06.2.01.06 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilaitasi |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilaitasi |  | 0 |  |
| 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yagn difaslitasi | 1 Keg | - |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yagn difaslitasi | 1 dok | 0 |  |
| 7.01.06.2.01.08 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yagn direkomendasikan |  |  |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yagn direkomendasikan |  |  |  |
| 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa yang disingkronkan (Fasilitasi dan Monitoring PBB) | 1 Keg | 3.000.000 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa yang disingkronkan (Fasilitasi dan Monitoring PBB) | 1 dok | 3.500.000 |  |
| 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitsi | 1 Keg | 3.000.000 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitsi | 1 dok | 0 |  |
| 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec Bontoharu | Jumlah Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasiitasi (Sosialisasi) | 1 Keg | 4.000.000 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec Bontoharu | Jumlah dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasiitasi (Sosialisasi) | 1 dok | 3.200.000 |  |
| 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kel. Bontobangun | Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasiitasi | 100% | 10.214.302 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kel. Bontobangun | Jumlah dokumen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasiitasi | 1 dok | 35.964.500 |  |
| 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec Bontoharu | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yag difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya | 9 Lembaga | 13.000.000 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec Bontoharu | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 dok | 3.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kel.Putabangun | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yag difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK dan LPM) | 2 Lembaga | 39.127.500 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kel.Putabangun | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 dok | 63.476.520 |  |
| 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kel.Bontobangun | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yag difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsinya (PKK dan LPM) | 0 | 0 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kel.Bontobangun | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 dok |  |  |
| 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec Bontoharu | Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi (Musrenbang) | 1 Keg | 16.000.000 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec Bontoharu | Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi (Musrenbang) | 1 dok | 9.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.14 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Kec Bontoharu | Jumlah kerjasama yang difasilitasi |  |  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Kec Bontoharu | Jumlah kerjasama yang difasilitasi |  |  |  |
| 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi | 1 dok | - |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Kec Bontoharu | Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi | 1 dok | 0 |  |
| 7.01.06.2.01.16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kec Bontoharu | Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Asistensi dan Pembinaan APBDes) | 2 Keg | 13.000.000 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kec Bontoharu | Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Asistensi dan Pembinaan APBDes) | 1 dok | 5.000.000 |  |
| 7.01.06.2.01.17 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec Bontoharu | Jumlah Pendampingan Desa yang dikoorinasikan |  |  |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec Bontoharu | Jumlah Pendampingan Desa yang dikoorinasikan |  |  |  |
| 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah kegiatan pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan | 1 Keg | 0 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kec Bontoharu | Jumlah dokumentasi pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan | 1 dok | - |  |
| 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Jumlah Kegiatan Pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan | 2 Keg | 32.159.815 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kel.Putabangun | Jumlah dokumentasi Pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan | 2 dok | 27.719.400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **7.106.911.239** |  |  |  |  |  |  | **6.929.078.990** |  |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Bontoharu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontoharu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Srategis Pemerintah.

Adapun kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isi-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah diuraikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adapu | **TABEL 2.4** | | | | |  | | |  |
|  | **USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024** | | | | | | | |  |
|  | **KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | **Besaran/Volume** | | **Catatan** |
|
|
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | |  | |  |
|  | ***PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA KELURAHAN*** | | | | | |  | |  |
| 1 | Pembangunan tanggul penahan ombak | Dusun Paoiya | Proporsi pantai yang aman dari pengaruh erosi dan abrasi | | | | ± 177 M | |  |
| 2 | Pembangunan Jalan Lingkar | Dari Gusung Ke Jenneiya | Terbukanya Jalur Pengembangan Perkebunan, Pariwisata, Pendidikan & Pemukiman | | | | 7 km x 4 m | |  |
| 3 | Pembangunan Drainase Depan Mesjid | Dusun Padang Tengah | Terlaksananya Pembangunan Drainase Depan Mesjid | | | | ± 300 M | |  |
| 5 | Pembangunan Drainase di Jalan Poros | Desa Bontotangnga | Tersedianya saluran air bersih | | | |  | |  |
| 6 | Lanjutan Pembangunan Bronjong Sungai Bontosunggu | Tanabau | Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Bronjong Sungai Bontosunggu | | | |  | |  |
| 7 | Pengerasan & Pengaspalan Jalan Menuju Kampung Bau Desa Bontotangnga Sekitar 700 M | Subur | Tersedianya Jalan Alternatif | | | | 700 M | |  |
| 8 | Perintisan jalan Baera - langsoga | Baera Selatan | jalan alternatif masyarakat | | | |  | |  |
| 9 | perintisan dan perkerasan jalan lingkar bag.barat dusun Tanaharapan | tanaharapan | jalan alternatif masyarakat | | | |  | |  |
| 11 | Pembangunan Bendungan Tamalaju | Palemba Timur | Tersedianya sarana pengairan bagi petani | | | | 1 Paket | |  |
| 12 | Instalasi/Jaringan Listrik antar Desa | Desa Kalepadang-Desa Bonto Tangnga | Tersedianya Sarana Penerangan | | | | 1 paket | |  |
| 15 | Pembangunan Talud Penahan Longsor | Desa Kahu-Kahu | Melindungi Pemukiman Dari Longsor Bencana | | | |  | |  |
| 16 | Bantuan Sumur BOR dan Air Bersih | Desa Kahu-Kahu | Tersedianya Air Bersih | | | | 10 Unit | |  |
| 17 | Pembangunan Tanggul Lapangan Sepak bola Tabang | Tabang | Panjang tanggul yang terbangun | | | | 100 M | |  |
| 18 | uPeningkatan jalan Hotmix jl. Tien Soeharto | Balang Sembo | Panjang Jalan yang di Hotmix | | | | 150 M | |  |
| 19 | Lanjutan Pembangunan Tanggul penahan ombak | Tangnga - Tangnga | Pencegah terjadinya abrasi dan air pasang | | | | 300 Meter | |  |
| 20 | Pembangunan drainase | Kampung Beru | Mencegah genangan air di jalan | | | | 100 Meter | |  |
| 21 | Peningkatan Jalan Hotmix Samping Rumah Sakit Menuju SMP 46 Kep. Selayar | Parappa | Tersedianya Akses Jalan Sekolah | | | | 150 Meter | |  |
| 22 | Lanjutan Pembangunan Jalan Bitombang - Tola | Lura Gantarang | Tersedianya Akses Jalan Masyarakat | | | | 3 KM | |  |
| 23 | Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | Desa Bontoborusu | Tertatanya Pemukiman yang Memadai | | | | 40 Unit | |  |
| 24 | Pembangunan Pos Polisi | Desa Kalepadang | Meningkatkan Keamanan di Desa Kalepadang | | | |  | |  |
| 25 | Pembangunan Jamban Keluarga | Desa Bontoborusu | Meningkatkan Masyarakat agar Tidak BAB di Sembarang Tempat | | | | 50 Unit | |  |
| 26 | Pembangunan Gedung Pertemuan | Puskesmas Bontosunggu | Pembangunan Gedung Pertemuan | | | | 1 Unit | |  |
| 27 | Pembangunan 1 ruang kelas baru SMPN 14 Kep. Selayar | Desa Bontosunggu | Ruang belajar | | | | 1 Kelas | |  |
| 28 | Pembangunan Gudang Produksi Desa | Desa Kalepadang | Terlaksananya Peningkatan layanan industri dan pemasaran | | | | 1 Paket | |  |
| 29 | Pembangunan Tambatan Perahu | Gusung Lengu | Meningkatkan ekonomi, akses Transportasi dan pelayanan masyarakat | | | | 100 x 3 M | |  |
| 30 | Pengadaan Kontainer Pembuangan Sampah | Dusun Padang Utara | Tersedianya Kontainer Pembuangan Sampah | | | | 2 Unit | |  |
| 31 | Pembangunan Jembatan Permanen Obyek Wisata Mangrove Kelurahan Bontobangun | Tangnga – Tangnga | Tersedianya Sarana Wisata Mangrove | | | | 1 Unit | |  |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | |  | |  |
|  | ***KEGIATAN PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN*** | | | |  | |  | |  |
| 1 | Bantuan Pupuk dan Racun | Dusun Bontomanai | | | Tersedianya Bantuan Pupuk dan Racun | | 50 Karung | |  |
| 2 | Bantuan Pupuk dan Racun | Dusun Bontomanai | | | Tersedianya Bantuan Pupuk dan Racun | | 50 Karung | |  |
| 3 | Penerangan Lampu PLN 1 x 24 Jam | Desa Bontoborusu | | | Menyalanya Lampu 24 jam | | 24 Jam | |  |
| 4 | Penerangan Lampu PLN 1 x 24 Jam | Desa Kahu-Kahu | | | Menyalanya Lampu 24 jam | | 24 Jam | |  |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | |  | |  |
|  | ***PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*** | | | | | | | |  |
| 1 | Pembangunan/ rehabilitasi Jembatan | Iraja Lebo | | Meningkatnya sarana perhubungan | | | | 1 Paket |  |
| 2 | Rehab jalan tani ke Jeneiya | Dusun Kahu-kahu Selatan | | Memperlancar akses jalan ke pertanian | | | | 4 KM |  |
| 3 | Rehab Jalan Poros Dari Dopa Ke SMA | Dusun Dopa | | Mempermudah Akses Jalan | | | |  |  |
| 4 | Rehab. Drainase bo'dia | Tabang Baru | | Panjang drainase yang direhab | | | | 700 M |  |
| 5 | Rehab Drainase Lembang Kanan dan kiri jalan | Tabang Baru | | Panjang Drainase yang direhab | | | | ± 1200 M |  |
| 6 | Rehabilitasi kantor lurah Putabangun | Tabang Baru | | Jumlah gedung yang direhab | | | | 1 kantor |  |
| 7 | Pemeliharaan Jalan Rabat | Gusung Lengu | | Meningkatkan ekonomi, akses Transportasi dan pelayanan masyarakat | | | | 300 m |  |
| 8 | Rehab Dermaga Kayu Dusun Manarai | Dusun Manarai | | Terbangunnya Prasarana Transportasi Laut Yang Memadai | | | | 150 M |  |
| 9 | Rehab Jembatan Kayu | Gusung Lengu | | Meningkatkan Ekonomi, Akses Transportasi dan Pelayanan Masyarakat | | | | 200 x 2,50 M |  |
| 10 | Rehab/Peningkatan Pembangunan Jembatan Mangrove | Gusung Lengu | | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | | | | 300 x 2 M |  |

:

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA**

**KECAMATAN BONTOHARU**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bontoharu adalah sebagai berikut :Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
   1. **Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bontoharu**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bontoharu mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Bontoharu secara optimal.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Bontoharu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Bontoharu Tahun 2016-2022. Tujuan Penyusunan Renja SKPD ini adalah :

* Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
* Untuk menjamin tercapainya integrasi dan sinergi antara Program dan Kegiatan SKPD
* Sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD
* Sebagai alat evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program kegiatan SKPD .

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat dibidang penerbitan persuratan;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan
3. Meningkatnya kolektabilitas PBB.
   1. **Program dan Kegiatan**

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel 3.1. Yaitusebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 3.1** | | | | | | | | | | | | | |
| **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **KECAMATAN BONTOHARU** | | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **KODE** |  | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Kelompok Sasaran** | **Rencana Tahun 2025** | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026** | | |
| **Nomenklatur urusan (program / kegiatan / sub kegiatn** | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | |
|  | | |
|  | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Pegawai Kec Bontoharu** | **Kec. Bth** | 100 | **3.425.773.474** | **DAU** |  | 100 | **3.425.773.474** | |
| X.XX.01.2.01 | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 16.100.000 | DAU |  | 100 | 16.100.000 | |
| X.XX.01.2.01.01 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis (Renja,RKA,DPA.RKAP,DPPA, Renstra) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.01.02 |  | b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA yang dikoordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 3.450.000 | DAU |  | 1 dok | 3.450.000 | |
| X.XX.01.2.01.03 |  | c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA perubahan yang dikoordinasikan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.01.04 |  | d | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA yang dikoordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 3.450.000 | DAU |  | 1 dok | 3.450.000 | |
| X.XX.01.2.01.05 |  | e | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan yang dikoordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 3.450.000 | DAU |  | 1 dok | 3.450.000 | |
| X.XX.01.2.01.07 |  | f | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ) | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 3 dok | 5.750.000 | DAU |  | 3 dok | 5.750.000 | |
| X.XX.01.2.01.0 |  | g | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.02. | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen  keuangan | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 2.731.173.474 | DAU |  | 100 | 2.731.173.474 | |
| X.XX.01.2.02.01 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 12 Bulan | 2.717.373.474 | DAU |  | 12 Bulan | 2.717.373.474 | |
| X.XX.01.2.02.02 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.02.03 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah verifikasi keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.02.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah rekon akutansi yang dikoordinasikan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.02.05 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 6.900.000 | DAU |  | 1 dok | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.02.06 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen tanggapan pemeriksaan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.02.07 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 2 dok | 6.900.000 | DAU |  | 2 dok | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.02.08 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03 | C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen BMD | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 6.900.000 | DAU |  | 100 | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.03.01 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen perencanaan kebutuhan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03.02 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah kegiatan pemangamanan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03.03 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasikan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03.04 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03.05 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Aset BMD | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 6.900.000 | DAU |  | 1 dok | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.03.06 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.03.07 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05. | D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | % ketersediaan dokumen kepegawaian | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 13.800.000 |  |  | 100 | 13.800.000 | |
| X.XX.01.2.05.01 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.02 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas lengkap yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.03 |  |  | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah pegawai yang didata dan di kelolah dokumen Administrasi kepegawaiannya | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 30 Orang | 6.900.000 | DAU |  | 30 Orang | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.05.04 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dikoordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 2 Sistem | 6.900.000 | DAU |  | 2 Sistem | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.05.05 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.06 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.07 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.08 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah pemindah-tugasan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.09 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang melakukan Diklat sesuai Tugas dan fungsinya |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.10 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.05.11 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimtek yang diikuti |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06. | E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | % ketersediaan administrasi umum perkantoran | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 114.540.000 | DAU |  | 100 | 114.540.000 | |
| X.XX.01.2.6.01 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.02 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.03 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.04 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistic kantor yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.05 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 5.340 lembar | 4.600.000 | DAU |  | 5.340 lembar | 4.600.000 | |
| X.XX.01.2.06.06 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 2 bahan bacaan | 6.900.000 | DAU |  | 2 bahan bacaan | 6.900.000 | |
| X.XX.01.2.06.07 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bahan yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.08 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 400 orang | 11.040.000 | DAU |  | 400 orang | 11.040.000 | |
| X.XX.01.2.06.09 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 522 kali | 92.000.000 | DAU |  | 522 kali | 92.000.000 | |
| X.XX.01.2.06.10 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis yang ditata-usahakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.06.11 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah fasilitas pendukung sistem |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07. | F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | % Ketersediaan BMD | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 5.083.000 | DAU |  | 100 | 5.083.000 | |
| X.XX.01.2.07.01 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipersipakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.02 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.05 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.06 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang dipersiapkan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 2 unit | 5.083.000 | DAU |  | 2 unit | 5.083.000 | |
| X.XX.01.2.07.07 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.09 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.10 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.07.11 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan Kantor |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.08. | G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | % ketersediaan jasa penunjang perkantoran | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 373.750.000 | DAU |  | 100 | 373.750.000 | |
| X.XX.01.2.08.01 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.08.02 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 3 Jasa | 28.750.000 | DAU |  | 3 Jasa | 28.750.000 | |
| X.XX.01.2.08.03 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.08.04 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 4 Jasa | 345.000.000 | DAU |  | 4 Jasa | 345.000.000 | |
| X.XX.01.2.09. | H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | %  pemeliharan BMD | Pegawai Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 164.427.000 | DAU |  | 100 | 164.427.000 | |
| X.XX.01.2.09.05 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.09.06 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 6 Unit | 5.037.000 | DAU |  | 6 Unit | 5.037.000 | |
| X.XX.01.2.09.07 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset yang dipelihara | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 6 Unit | 4.140.000 | DAU |  | 6 Unit | 4.140.000 | |
| X.XX.01.2.09.08 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.09.09 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi/dipelihara | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 Unit | 69.000.000 | DAU |  | 1 Unit | 69.000.000 | |
| X.XX.01.2.09.10 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.09.11 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.09.12 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.09.13 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang ditingkatkan umur pakainya | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 7 unit | 86.250.000 | DAU |  | 7 unit | 86.250.000 | |
| X.XX.01.2.10. | I | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| X.XX.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.00** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01** | **KECAMATAN** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan** | Masyarakat Kec Bontoharu | **Kec. Bth** | **20 menit** | **8.743.076** | **DAU** |  | **20 menit** | **8.743.076** | |
| 7.01.02.2.01 | A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | - |  |  | 100 | - | |
| 7.01.02.2.01.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasikan (Penanggulangan Gizi Buruk) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.01.02 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang ditingkatkan | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Dok |  |  |  | 1 Dok |  | |
| 7.01.02.2.02. | B | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 4.143.076 | DAU |  | 100 | 4.143.076 | |
| 7.01.02.2.02.01 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.02.02 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.02.03 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Efektifitas Pelayanan kepada masyrakat yang ditingkatkan (Tersedianya Laporan Informasi Kependudukan) | Pegawai Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 Dok | 4.143.076 | DAU |  | 1 Dok | 4.143.076 | |
| 7.01.02.2.03. | C | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | |
| 7.01.02.2.03.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.03.02 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasaranan dan  Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.04. | D | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 4.600.000 | DAU |  | 100 | 4.600.000 | |
| 7.01.02.2.04.01 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.04.02 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Non Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.02.2.04.03 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Penyusunan Propil Kec) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 dok | 4.600.000 |  |  | 1 dok | 4.600.000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **% Peningkatan Partisifasi masyarakat dalam pembangunan** | **Masyarakat Kec. Bontoharu** | **Kec.Bth** | **100** | **30.892.203** | **DAU** |  | **100** | **30.892.203** | |
| 7.01.03.2.01. | A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | % Kegiatan Pemberdayaan Desa | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec.Bth | 100 | 25.142.203 | DAU |  | 100 | 25.142.203 | |
| 7.01.03.2.01.01 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Desa/Kel |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.01.02 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersinkronisasi (Pembinaan Kampung KB) | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 10.192.203 | DAU |  | 1 Keg | 10.192.203 | |
| 7.01.03.2.01.03 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.01.04 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.01.05 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Jumlah evaluasi kelurahan yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.01.06 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat) | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 14.950.000 | DAU |  | 1 Keg | 14.950.000 | |
| 7.01.03.2.02. | B | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | % Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 100 | 5.750.000 | DAU |  | 100 | 5.750.000 | |
| 7.01.03.2.02.01 |  |  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Pembinaan Karang Taruna) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.02.02 |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatn | Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan Kelurahan Sehat) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.03.2.02.03 |  |  | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Pesisisr | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 5.750.000 | DAU |  | 1 Keg | 5.750.000 | |
| 7.01.03.2.02.04 |  |  | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah pemanfataan teknologi tepat guna yang terfasilitasi | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **% Penurunan Jumlah kriminalitas di Kecamatan** | **Masyarakat Kec. Bontoharu** | **Kec. Bth** | **1,00** | **23.314.870** | **DAU** |  | **1,00** | **23.314.870** | |
| 7.01.04.2.01. | A | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | % Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 1,00 | 23.314.870 | DAU |  | 1,00 | 23.314.870 | |
| 7.01.04.2.01.01 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya sinergi yang baik (Penanggulangan Covid 19) | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg | 23.314.870 | DAU |  | 1 Keg | 23.314.870 | |
| 7.01.04.2.01.02 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.04.2.02. | B | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | | % penerpan dan penegakan perda dan perkada |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.04.2.02.01 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan (berkurangnya persentase kasus illegal logging) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **% Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan** | **Masyarakat Kec. Bontoharu** | **Kec. Bth** | **100** | **58.287.175** | **DAU** |  | **100** | **58.287.175** | |
| 7.01.05.2.01. | A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 3 Keg | 58.287.175 | DAU |  | 3 Keg | 58.287.175 | |
| 7.01.05.2.01.01 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan peningkatan kecintaan terhadap tanah air yang terlaksana | Masyarakat Kec. Bontoharu | Kec. Bth | 2 kegiatan | 27.237.175 | DAU |  | 2 kegiatan | 27.237.175 | |
| 7.01.05.2.01.02 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.05.2.01.03 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.05.2.01.04 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah pembinaan keagamaan yang dilakukan | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg | 31.050.000 | DAU |  | 1 Keg | 31.050.000 | |
| 7.01.05.2.01.05 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah konflik yang ditangani |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.05.2.01.06 |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.05.2.01.07 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah urusan pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.05.2.01.08 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Forum koordinasi pimpinan |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **07.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | **% urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah** | **Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat** | **Kec. Bth** | **55** | **80.436.302** | **DAU** |  | **55** | **80.436.302** | |
| 7.01.06.2.01 | A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | % pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 55 | 80.436.302 | DAU |  | 55 | 80.436.302 | |
| 7.01.06.2.01.01 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.02 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah pembinaan tata pemerintahan desa yang difasilitasi (Lomba Desa) | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg | 18.336.302 | DAU |  | 1 Keg | 18.336.302 | |
| 7.01.06.2.01.03 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg | 3.450.000 | DAU |  | 1 Keg | 3.450.000 | |
| 7.01.06.2.01.04 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah penerapan dan penegakan perundang-undangan yang difasiitasi  (Penertiban Ternak) | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg | 3.450.000 | DAU |  | 1 Keg | 3.450.000 | |
| 7.01.06.2.01.05 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah pelaksanaan kepala desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.06 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilaitasi | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 2 Desa |  |  |  | 2 Desa |  | |
| 7.01.06.2.01.07 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yagn difaslitasi | Pegawai Kec. Bontoharu dan Masyarakat | Kec. Bth | 1 Keg |  |  |  | 1 Keg |  | |
| 7.01.06.2.01.08 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yagn direkomendasikan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.09 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang disingkronkan (Fasilitasi dan monitoring PBB) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 3.450.000 | DAU |  | 1 Keg | 3.450.000 | |
| 7.01.06.2.01.10 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah pembangunan kawasan yang difasilitsi | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg |  |  |  | 1 Keg |  | |
| 7.01.06.2.01.11 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasiitasi | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 4.600.000 | DAU |  | 1 Keg | 4.600.000 | |
| 7.01.06.2.01.12 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi (PKK) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 14.950.000 | DAU |  | 1 Keg | 14.950.000 | |
| 7.01.06.2.01.13 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang difasilitasi (musrenbang) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 18.400.000 | DAU |  | 1 Keg | 18.400.000 | |
| 7.01.06.2.01.14 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah kerjasama yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.15 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Pembinaan dan Asistensi APBDes) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 Keg | 11.500.000 | DAU |  | 1 Keg | 11.500.000 | |
| 7.01.06.2.01.17 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Pendampingan Desa yang dikoorinasikan |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.01.06.2.01.18 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan (Pengawasan IMB) | Masyarakat Kec Bontoharu | Kec. Bth | 1 keg | 2.300.000 | DAU |  | 1 keg | 2.300.000 | |
|  |  |  |  | JUMLAH |  |  |  | **3.627.447.100** |  |  |  | **3.627.447.100** | |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Bontoharu selama 5 tahun ke depan (2022-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Bontoharu. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontoharu terdiri dari 6 Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoharu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyedian Administrasi pelaksanaan tugas ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
7. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
13. Bimbingan Tehnis Implementasi peraturan Perundang-undangan
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
22. Pengadaan Mebel
23. Pengadaan aset tetap lainnya
24. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
25. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
28. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
33. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
36. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatn
37. Pembinaan,pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* + 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   * 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
2. Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

1. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
2. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
3. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

C. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

D. Koordinasi dan singkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyrakat (PPKM)

a Penanganan covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
6. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
9. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
10. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
11. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
12. Fasilitasi pelaksanaan tugas,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyrakatan
13. Fasilitasi pelaksanaan Pilkades

**BAB V**

**P E N U T U P**

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bontoharu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontoharu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Matalalang, 2024

**CAMAT BONTOHARU,**

**A.BATARA GAU, SE**

Pangkat : Pembina

NIP. 197505292010011008